

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Pengadilan Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka cipta, 2008.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam Jakarta, 2006.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta Penerbit amani Jakarta Tahun 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- P.A.F Lamintang dan C. Djasman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1981.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1976.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan, Delik-delik Khusus*, Bogor: Politia, 1984.
- Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1983.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paraminta, 1973.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana dalam Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1986.

Jurnal:

- Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No 1, 2018.

Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, Mimbar Yustitis, Vol 2, No 2, 2018.

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, 2018

Syamsudin, *Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol 17, No 3, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan

Surat Edaran No.: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi